

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Nagan Raya pada Triwulan II Tahun 2025, yang mencakup Bulan April, Mei, dan Juni 2025, menunjukkan dinamika inflasi daerah yang berfluktuasi dengan kecenderungan melemahnya tekanan harga pada akhir triwulan.

Pada **Bulan April 2025**, IPH Kabupaten Nagan Raya tercatat pada **M2 sebesar 0,25%**, **M3 sebesar 0,95%**, dan **M4 sebesar 1,25%**, sementara **M1 tidak dirilis**. Kondisi ini mengindikasikan adanya **peningkatan harga secara terbatas**, terutama pada cakupan komoditas yang lebih luas, yang mencerminkan mulai munculnya tekanan inflasi pada kelompok barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa.

Selanjutnya, pada **Bulan Mei 2025**, perkembangan IPH menunjukkan **perubahan arah tekanan harga**, dengan **M1 tercatat sebesar 0,54%**, **M3 sebesar -0,42%**, **M4 sebesar -1,05%**, dan **M5 sebesar -1,26%**, sementara **M2 tidak dirilis**. Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pada cakupan komoditas terbatas masih terjadi kenaikan harga, namun secara umum pada cakupan yang lebih luas mulai terjadi **penurunan harga (deflasi)**, terutama pada kelompok barang non-pangan dan jasa.

Pada **Bulan Juni 2025**, IPH Kabupaten Nagan Raya seluruhnya menunjukkan **angka negatif**, dengan **M1 sebesar -1,42%**, **M2 sebesar -1,41%**, **M3 sebesar -1,74%**, dan **M4 sebesar -1,85%**. Kondisi ini mencerminkan **deflasi yang semakin dalam dan merata** pada berbagai kelompok komoditas, baik barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, maupun jasa, yang mengindikasikan melemahnya tekanan inflasi daerah pada akhir Triwulan II 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Kabupaten Nagan Raya pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa **tekanan inflasi relatif terkendali dengan kecenderungan menurun**, namun tetap perlu diantisipasi risiko ke depan berupa **potensi pembalikan arah inflasi**, peningkatan permintaan musiman, gangguan pasokan, serta ketergantungan distribusi dari luar daerah yang dapat memicu fluktuasi harga pada periode berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan **perkembangan inflasi daerah dan/atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April, Mei, dan Juni 2025)**, yang tercermin dari pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan IPH pada **Bulan April 2025** yang menunjukkan nilai positif pada **M2 (0,25%), M3 (0,95%), dan M4 (1,25%)** mengindikasikan adanya **tekanan kenaikan harga pada cakupan komoditas yang lebih luas**, meskipun belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa, terutama akibat keterbatasan pasokan dan distribusi pada periode tertentu.

Selanjutnya, pada **Bulan Mei 2025**, IPH menunjukkan **perbedaan arah pergerakan harga**, di mana **M1 masih tercatat positif (0,54%)**, sementara **M3, M4, dan M5 masing-masing mengalami penurunan harga sebesar -0,42%, -1,05%, dan -1,26%**. Kondisi ini mencerminkan **ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan**, serta belum optimalnya pengendalian harga secara menyeluruh, khususnya pada kelompok barang non-pangan dan jasa. Perbedaan tersebut juga mengindikasikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi belum sepenuhnya terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir.

Pada **Bulan Juni 2025**, IPH pada seluruh kelompok yang dirilis menunjukkan **angka negatif**, yakni **M1 (-1,42%), M2 (-1,41%), M3 (-1,74%), dan M4 (-1,85%)**. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya **deflasi yang cukup dalam dan meluas**, yang menjadi permasalahan tersendiri dalam pengendalian inflasi daerah. Deflasi ini mencerminkan **melemahnya permintaan masyarakat**, potensi penurunan daya beli pelaku usaha dan petani, serta risiko perlambatan aktivitas ekonomi daerah apabila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di daerah pada Triwulan II Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan **potensi kenaikan harga**, tetapi juga **risiko deflasi yang berlebihan**. Fluktuasi IPH yang tajam antarbulan menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pengendalian pasokan, distribusi, dan penguatan produksi lokal. Selain itu, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, belum optimalnya sistem peringatan dini harga, serta faktor musiman dan eksternal menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah pada **Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April, Mei, dan Juni 2025)** dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memperhatikan dinamika perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa yang tercermin dalam pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Pada **Bulan April 2025**, seiring dengan IPH yang menunjukkan **kenaikan pada M2 sebesar 0,25%, M3 sebesar 0,95%, dan M4 sebesar 1,25%**, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi yang difokuskan pada **pemantauan intensif harga dan ketersediaan pasokan**, khususnya pada komoditas pangan strategis. Langkah ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, monitoring pasar secara berkala, serta

kesiapan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Selanjutnya, pada **Bulan Mei 2025**, ketika IPH mulai menunjukkan **perubahan arah dengan adanya penurunan harga pada M3, M4, dan M5** masing-masing sebesar **-0,42%, -1,05%, dan -1,26%**, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada **penjagaan keseimbangan antara pasokan dan permintaan**. Pemerintah daerah tetap melanjutkan kegiatan stabilisasi harga, pengawasan distribusi, serta memastikan kelancaran rantai pasok agar penurunan harga tidak berdampak negatif terhadap pendapatan produsen dan pelaku usaha lokal.

Pada **Bulan Juni 2025**, IPH yang seluruhnya menunjukkan **angka negatif**, yakni **M1 (-1,42%), M2 (-1,41%), M3 (-1,74%), dan M4 (-1,85%)**, mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pengendalian inflasi dengan fokus pada **antisipasi risiko deflasi**. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain menjaga kesinambungan produksi dan distribusi, mendorong penyerapan hasil produksi lokal, serta memperkuat koordinasi TPID dalam memantau perkembangan harga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan secara **adaptif dan responsif terhadap dinamika harga**, dengan menitikberatkan pada stabilisasi harga jangka pendek sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah. Sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terus diperkuat guna meminimalkan risiko inflasi maupun deflasi yang berlebihan pada periode berikutnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada **Triwulan II Tahun 2025** dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa yang tercermin dari pergerakan **Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Nagan Raya pada Bulan April, Mei, dan Juni 2025**.

Pada **Bulan April 2025**, IPH yang menunjukkan kenaikan pada **M2 (0,25%), M3 (0,95%), dan M4 (1,25%)** mengindikasikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan mampu **menahan tekanan harga agar tetap dalam batas terkendali**, meskipun masih terdapat kenaikan harga pada cakupan komoditas yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemantauan harga dan pengamanan pasokan telah berjalan, namun efektivitas pengendalian pada kelompok komoditas tertentu masih perlu diperkuat.

Selanjutnya, pada **Bulan Mei 2025**, IPH mulai menunjukkan **perubahan arah dengan terjadinya penurunan harga pada M3 (-0,42%), M4 (-1,05%), dan M5 (-1,26%)**, sementara M1 masih tercatat positif. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan stabilisasi

harga dan pengawasan distribusi mulai memberikan dampak dalam menurunkan tekanan inflasi. Namun demikian, perbedaan arah pergerakan harga antar kelompok komoditas menunjukkan bahwa pengendalian inflasi belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penyempurnaan dari sisi integrasi kebijakan.

Pada **Bulan Juni 2025**, seluruh IPH yang dirilis menunjukkan **angka negatif**, yakni **M1 (-1,42%), M2 (-1,41%), M3 (-1,74%), dan M4 (-1,85%)**, yang mengindikasikan terjadinya **deflasi yang cukup dalam dan meluas**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengendalian inflasi efektif dalam menekan kenaikan harga, namun pada sisi lain perlu diwaspadai potensi **deflasi berlebihan** yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan produsen, pelaku usaha, dan melemahnya aktivitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan **cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga**, namun masih bersifat **reaktif dan jangka pendek**. Diperlukan penguatan kebijakan yang lebih berorientasi pada pencegahan, penguatan produksi lokal, serta keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pencegahan deflasi, agar stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjaga secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi

Pengendalian Inflasi Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada **Triwulan II Tahun 2025**, yang menunjukkan adanya fluktuasi harga serta kecenderungan deflasi pada akhir triwulan, diperlukan langkah kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

1. Penguatan Kebijakan Preventif Berbasis Early Warning

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemantauan harga dan pasokan secara lebih dini dan terintegrasi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif terhadap kenaikan atau penurunan harga, tetapi mampu mengantisipasi potensi gejolak inflasi maupun deflasi sejak awal.

2. Menjaga Keseimbangan antara Pengendalian Inflasi dan Pencegahan Deflasi

Kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan tidak hanya pada penekanan kenaikan harga, tetapi juga pada pencegahan deflasi yang berlebihan, terutama melalui:

- Menjaga keberlanjutan produksi dan penyerapan hasil pertanian dan perikanan lokal
 - Mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap berjalan optimal
-

3. Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal

Pemerintah daerah perlu mempercepat penguatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana produksi, pendampingan petani, serta pengelolaan pascapanen. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan menekan volatilitas harga jangka menengah dan panjang.

4. Optimalisasi Stabilisasi Harga yang Tepat Sasaran

Pelaksanaan stabilisasi harga seperti operasi pasar dan pasar murah perlu dilakukan secara lebih selektif dan berbasis data, dengan memperhatikan waktu, lokasi, serta komoditas yang benar-benar berkontribusi terhadap fluktuasi harga.

5. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok

Diperlukan upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi, memperlancar arus barang, dan menekan biaya logistik, khususnya untuk komoditas strategis, guna mengurangi disparitas harga antar wilayah dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

6. Penguatan Peran dan Kinerja TPID

TPID perlu didorong untuk:

- Memperjelas target dan indikator kinerja pengendalian inflasi
 - Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah
 - Mengintegrasikan program pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
-

7. Penguatan Komunikasi Publik dan Pengendalian Ekspektasi

Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi publik terkait perkembangan harga dan

kebijakan pengendalian inflasi, guna mencegah kepanikan pasar, perilaku spekulatif, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

8. Perlindungan Daya Beli dan Pelaku Usaha Lokal

Dalam kondisi deflasi, kebijakan perlu diarahkan untuk:

- Melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah
 - Menjaga pendapatan petani dan pelaku usaha kecil
 - Mendorong konsumsi masyarakat secara terukur dan berkelanjutan
-

□ Penutup

Rekomendasi kebijakan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2025 menekankan pentingnya **keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan ekonomi daerah**. Dengan kebijakan yang lebih preventif, terintegrasi, dan berbasis data, pengendalian inflasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif pada triwulan berikutnya.